

IDE DAN PRAKSIS TOLERANSI

Pengalaman Eropa Pasca-Reformasi Martin Luther

Eddy Kristiyanto

STF Driyarkara, Jakarta

Abstract:

One of theses that would be presented here in this article is within the historiography of the modern era of religious tolerance the Protestant Reformation era has always been considered of paramount important for the developments which led to the achievement of a liberal and tolerant society. The history shows, however, that the first century of the Reformation was followed by the intolerance, and some nations like Germany, France, England put into practice the political, economic interets which corelated with religious belief. The break-up of the near monolithic structure of medieval Western Christianity for the first time presented contemporary lay and ecclesiastical rulers with the practical problem of how to deal with religious plurality. The aspects of religious toleration, such as freedom of conscience and freedom of worship, are something new. This article presents the efforts of Western Christians to give the solution.

Keywords: Reformasi, Gereja, Edikt Nantes, Koeksistensi Damai, Revokasi Edikt Nantes, Akta Toleransi, Perdamaian Westfalen, *The Test Act*

*Toleration is a quality that most members of modern liberal societies prize
- until they have to put up with something truly intolerable
(Philip Benedict)*

Indonesia, yang pernah dipimpin oleh “The Smiling General”¹, menghangatkan wacana tentang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) pada dekade terakhir ini. Hal itu dikarenakan antara lain oleh maraknya konflik horisontal, yang diberitakan telah disulut oleh orang atau sekelompok orang yang bekerja secara sistematis dan terorganisasi dengan menggunakan isu SARA. Konflik tersebut terlalu sering mengobjekkan orang-orang yang dikategorikan di bawah nama “mereka” dan “bukan orang kita” menjadi korban dan tumbal. Seakan-akan sudah merupakan keniscayaan, jika konflik semacam itu muncul, lalu dinding-dinding dikotori dengan ungkapan *100% Pribumi, Milik Kristen, Islam Murni*, dlsb. Dalam arti tertentu, ungkapan-ungkapan ini merupakan suatu manifestasi intoleransi. Saksi-saksi bisu tentang semua ini masih hidup di Pasuruan, Surabaya, Tasikmalaya, Rengasdengklok,

1 Sebutan yang diciptakan O.G. Roeder untuk orang nomor satu dalam periode Orde Baru, O.G. Roeder, *The Smiling General. President Soeharto of Indonesia*, Djakarta: Gunung Agung Ltd., 1969.

Jalan Ketapang, Kupang, Sambas, Maluku, Ambon, Mataram, Makasar, Poso, dan lain sebagainya.

Ada tidaknya sikap intoleran – demikian juga sikap toleran – dalam konteks situasi Indonesia sangat kompleks. Sebab sikap-sikap tersebut berhubungan langsung dan tidak langsung dengan latar belakang kepribadian, keyakinan pribadi, pendidikan, sistem politik, keadaan ekonomi, psikologi dan alam budaya. Dan lagi, setiap “pandangan hidup” yang berhubungan dengan sunsur-unsur tersebut pastilah juga berhubungan dengan keyakinan dasariah hidup manusia, seperti keselamatan, martabat manusia, alam semesta, iman, moral, demokratisasi, Allah, sesama, hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, dlsb. Mengingat keyakinan dasariah penganut agama dapat disuburkan dan diasah oleh kenangan (*memory*) akan pengalaman masa lampau, maka fokus karangan ini adalah mencari jawaban atas soal: “*Bagaimana gagasan dasariah dan praksis toleransi dan intoleransi di Eropa Barat setelah kesatuan agama tidak lagi terwujud dengan munculnya Reformasi Protestan?*”

Pengalaman (Kristen) Eropa Barat dapat menjadi salah satu bahan komparasi dengan ide-ide tentang toleransi dan intoleransi yang barangkali masih hidup dan berkembang di Indonesia dewasa ini. Untuk itulah secara terinci berikut ini akan dijawab persoalan tersebut dengan melakukan *sightseeing* sambil mengacu pada peristiwa, terutama yang terjadi di Eropa pada era modern (sejak Reformasi Protestan), yang melahirkan prinsip-prinsip dan pelaksanaan gagasan toleransi dan intoleransi. Selain itu, studi ini mengindahkan pendekatan-pendekatan hermeneuse historis, seraya memperhatikan data historis dan mengedepankan interpretasi atasnya sesuai dengan prinsip historiografi, yakni konvergensi sumber. Pada akhir studi ini dipresentasikan dengan pemandangan singkat tentang sikap Gereja Katolik Roma saat itu atas ide dan praksis toleransi-intoleransi.

1. GENESIS IDE TOLERANSI

Apa yang kita maksudkan, jika kita berbicara tentang toleransi sebagai suatu fenomena historis? Gagasan modern tentang toleransi itu secara hakiki bersifat permisif, membolehkan segala sesuatu yang berbeda menyangkut iman dan gaya hidup demi hidup bersama tanpa merugikan warga sipil atau keadaan ekonomi. Paham ini mengimplikasikan netralitas sikap, atau sekurang-kurangnya tiadanya perseteruan terselubung yang seringkali kontraproduktif. Selain itu, paham itu juga melampaui kepercayaan religius, di antara hal-hal lain, gaya hidup, ras, perbedaan usia dan kultural. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan oleh sifat kodrati setiap kepercayaan senantiasa mengandung kecenderungan eksklusif dan tertutup, personal dan pilihan pribadi. Kadang-kadang, toleransi diartikulasikan dalam terminologi kepercayaan religius, tetapi terkadang menyangkut pula perbedaan etnik dan kultural. Menurut Bob Sribner dalam hal kepercayaan religius, toleransi dalam konteks historis pokok pembicaraan kita bersangkut-paut dengan 3 (tiga) paham yang saling berhubungan:

- Claims to freedom of conscience, as advanced by Luther at the Diet of Worms, but also understood by all those of a humanist-erasmian orientation;
- separation of secular and spiritual authority inherent in Luther's Two Kingdom's doctrine (but also inherent in the medieval – and erasmian – distinction between those offences subject to ecclesiastical censure and those punishable by civil law);
- love of neighbour and patience with weaker brethren – an essentially erasmian notion, but one shared by many of the early reformers.²

Pembicaraan perihal toleransi khususnya di zaman kontemporer ini dapat dirincikan dalam dua bagian.³ *Pertama* menyangkut prinsip-prinsip dan kaitan toleransi dengan intoleransi, misalnya alasan-alasan yang sering dikemukakan sebagai pendukung dan penghambat. Di sini dibicarakan argumen *pro* dan argumen *kontra* terhadap toleransi. *Kedua*, wujud nyata atau praktik toleransi dan intoleransi sebagai sesuatu yang berbeda dengan gagasan *pro* dan *kontra* terhadap toleransi.

Tidak bermanfaat membantah kebenaran historis berikut ini, bahwasanya gerakan pembaruan keagamaan yang dirintis Martin Luther dan kawan-kawannya, yang lebih populer disebut dengan istilah Reformasi Protestantisme, telah menyebabkan keterpecahan agama di Eropa Barat dari satu agama [*baca*: Gereja] Katolik Roma menjadi dua agama bahkan lebih. Masalah baru muncul dari padanya, yakni bagaimanakah mewujudkan koeksistensi damai dalam keanekaragaman agama itu? Tegasnya, bagaimana menepis keluar masyarakat yang eksklusif-dogmatis yang diinspirasi oleh monopoli gerejawi dan agamawi? Dalam kenyataannya, lahirnya Protestantisme mendesak munculnya gagasan sekaligus masalah toleransi. Dalam sejarahnya, toleransi tampil sebagai pemenang setelah melalui perjuangan yang lama di dalam kesulitan-kesulitan mahabesar yang berhubungan dengan usaha dan kesalahan teoretis-praktis.

Selama kurun waktu yang relatif lama gagasan dan praktik toleransi dipandang oleh pihak Katolik [dan Protestan] sebagai tindak kriminal serta pelecehan terhadap kebenaran, cintakasih, masyarakat dan Negara. Dapat dibayangkan bagaimana situasi Geneva di bawah Yohanes Calvin, London di bawah Raja Henry VIII dan Roma di bawah Paus Pius V. Bagi mereka, yakni para pendukung tokoh-tokoh tersebut, toleransi menjadi sebuah *anathema* (laknat). Sebab masing-masing melihat dari dan demi kepentingan diri mereka sendiri. Ketertutupan terhadap pihak lain di satu pihak, dan keprihatinan akan keesaan Gereja Kristus di lain pihak, saling berhadapan tanpa sempat menggerakkan daya rekonsiliasi yang sehat dan penuh hormat.

Berikut ini akan kita lihat pandangan banyak orang Katolik (dan Protestan), termasuk para pemuka/pemimpin jemaat, terhadap toleransi, terutama pada awal zaman modern, yakni ketika kesatuan agama di Eropa merupakan ilusi, dan pluralitas agama merupakan keniscayaan; sementara itu banyak orang tidak siap dan tidak

2 Bob Scribner, "Preconditions of tolerance and intolerance in sixteenth-century Germany," in O.P. Grell – B. Scribner, (eds.), *Tolerance and Intolerance ...*, p. 34.

3 *Tolerance and Intolerance ...*, menginspirasi refleksi historis ini.

disiapkan untuk menerima dan mengakui seraya menghormati perbedaan pandangan dan ketidaksamaan keyakinan. Keanekaan pandangan dan opini atau heterodoksi masih dipandang sebagai gagasan makar yang perlu dieliminasi sedini mungkin.

1.1. Toleransi: Tindak Kriminal Terhadap Kebenaran

Orang-orang yang toleran sering kali diartikan identik dengan orang yang bersikap indifferen atau relativisme. Dan setiap indifferensisme⁴ tidak diperkuat oleh bukti-bukti objektif, sehingga halnya sedikit banyak bercorak subjektif. Selain itu, banyak orang yang membela mati-matian ajaran yang benar dengan tidak membiarkan hidup ajaran yang tidak benar: heretik [bidaah]. Sebab mereka ini bertentangan dengan ajaran Kristus, amanat Kitab Suci. Kebenaran Kristus itu sifatnya tunggal, mutlak dan abadi. Amanat Kitab Suci itu jelas dan tidak mendua. Jika sifat ajaran Kristus itu demikian, maka sikap merelatifkan ajaran dengan sikap toleran itu diidentikkan dengan tindak kriminal. Tentu saja, para penyembah berhala dan penghajat, misalnya, tidak dapat ditolerir. Karena mereka ini bertentangan dengan ajaran Kristus dan Alkitab.

1.2. Toleransi: Tindak Kriminal Terhadap Cintakasih

Sikap toleran dipandang sebagai aksi kriminal melawan cintakasih. Hal ini dikarenakan toleransi itu ibarat membiarkan pintu terbuka bagi aneka ragam kesalahan. Siapa yang toleran berarti tidak menyadari dan tidak berupaya untuk menentang bahaya yang sedang mengancam, membiarkan diri terbuka di hadapan kenyataan yang menyebabkan kematian kekal jiwa-jiwa. Calvin pernah menegaskan, bahwa kemanusiaan mereka yang ingin menyelamatkan bidaah itu lebih kejam. Sebab ia membiarkan srigala memangsa habis domba gembalaannya. Bahkan tidak jarang orang mengungkapkan kecemasan ini: jika ada kebebasan beragama dan beribadat, maka hal itu akan diikuti oleh munculnya pelbagai macam sekte dan aliran keagamaan, yang bukannya mengupayakan keutuhan, persatuan, saling menghormati. Akhir dari semua ini adalah konflik, yang saling menyingkirkan, yang tentu saja melanggar cinta kasih.

4 Indifferensisme merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama [bahkan aliran kepercayaan pun] di dunia ini sama baiknya [kalau demikian juga sama buruknya!]. Ini berarti bahwa semua agama itu sama saja. Praktisnya, ajaran dan penganut agama tertentu tidak mengatakan kualitas kemanusiaan, misalnya ajaran dan penganut agama Islam secara objektif lebih baik daripada ajaran dan penganut agama Protestan. Demikian pula sebaliknya! Oleh karena itu, orang tidak perlu mempersoalkan agama mana yang dipeluk seseorang. Indifferensisme pada prinsipnya kontradiktoris. Mengapa? Sebab fakta memperlihatkan bahwa agama yang satu berbeda dengan agama yang lain. Lebih dari sekedar perbedaan, ada hal-hal prinsipal yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Misalnya, ajaran agama Islam tentang Yesus yang historis dan injili bukan hanya berbeda, tetapi bahkan bertentangan dengan ajaran agama Katolik Roma.

1.3. Toleransi: Tindak Kriminal Terhadap Masyarakat dan Negara

Ada anggapan, jika kemajemukan agama (seperti di Indonesia pada zaman Orde Baru ada 5 agama resmi yang diakui pemerintah) diizinkan, maka kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara diganggu-gugat. Bahkan dikatakan, jika tidak ada kesepakatan dalam iman dan masalah-masalah berkenaan dengan Tuhan, maka mustahil ada kesepakatan dalam masalah-masalah profan dan politik. Dalam traktat Perdamaian Augsburg, 1555, misalnya ditegaskan, “Setiap pangeran memiliki hak dan kekuasaan untuk melindungi agama lama dalam wilayahnya, kota-kotanya, dan komunitas-komunitasnya. Sebab *ubi unus dominus, ibi una sit religio*.” (Artinya, di mana ada satu tuan, di sana ada satu agama). Penegasan ini disetujui baik oleh pihak Katolik maupun pihak Protestan, kendati ada pelbagai reaksi menentanginya.⁵

Sebaliknya, perlu pula dinyatakan adanya sejumlah alasan yang mendukung toleransi. Pertama-tama, minimalisme dogmatis. Pada awal Reformasi Protestan, ketika belum begitu jelas perbedaan mendalam mengenai dogma dari kedua belah pihak, Erasmus van Rotterdam mengedepankan anggapan yang menarik. Kesatuan religius dapat dipulihkan kembali dengan jalan kesepakatan tentang beberapa hal substansial. Bagi Erasmus, hal-hal yang dapat didiskusikan kembali, misalnya primat paus, asal-usul ilahi pengakuan dosa, dlsb.⁶ Dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah aspek moral, dan bukan aspek dogma.

Diskursus Erasmus diperlebar oleh Sebastian Châteillon yang mengatakan bahwa kristianisme seyogyanya lebih menitik-beratkan pada kejernihan kualitas hidup daripada ketepatan [rumusan] doktrin. Diibaratkannya, Kristus itu seorang raja yang bepergian untuk suatu waktu yang tidak ditentukan. Ia mengingatkan kepada para bawahan-Nya untuk menentukan sendiri kapan Diri-Nya kembali. Sang Raja tidak berkenan memastikan kapan saatnya tiba, di mana Dia bakal mengenakan pakaian putih. Para bawahannya yang mengisi waktu dengan mendiskusikan hal-hal doktriner itu serupa dengan orang yang tidak menyiapkan pakaian putih. Mereka ini membuang-buang waktu dengan bertengkar mengenai perjalanan Sang Raja dan saat kapan Dia akan kembali.

Bidaah atau heretik semata-mata adalah divergensi pandangan, di mana tidak mungkin dicapai suatu kepastian. Sebab Tuhan, yang juga telah mewahyukan dengan jelas apa yang diperlukan untuk keselamatan, ingin membiarkan orang dalam suasana kegelapan. Lebih lanjut, semua hal yang berkenaan dengan iman, misalnya dogma Trinitas, penebusan Kristus, baptis dan sebagainya, dapat jadi bermanfaat, akan tetapi tidak [mutlak] perlu untuk keselamatan. Tidak perlu orang bersusah-payah mencari manakah Gereja yang sejati. Sejalan dengan itu, Negara tidak berhak untuk menerapkan proses hukum terhadap para bidaah.

5 Joseph Lortz, *Die Reformation in Deutschland*. ..., S. 213 ss.

6 Lihat C. Augustijn, *Erasmus da Rotterdam*. ..., pp. 163-182.

2. KOEKSISTENSI DAMAI DENGAN PRINSIP MINUS MALUM

Pada paragraf kedua abad XVI meletus perang agama yang berkesinambungan antara Huguenots (Kalvinis) dan Katolik di Perancis. Tidak sedikit korban yang jatuh dari kedua pihak. Maka diusahakan pelbagai cara untuk mencegah Henry dari wangsa Borbon, seorang Kalvinis, naik takhta. Sebab, jika Henry sampai menjadi raja Perancis ini berarti suatu kemenangan Kalvinis di seluruh Perancis. Selain itu, Perang 30 Tahun [1618-1648] yang melibatkan Perancis, Jerman dan Swedia berdampak yang sangat besar.⁷

Perang 30 Tahun yang meletus di daratan Jerman telah memporakporandakan perekonomian dan masyarakat Jerman: jumlah penduduknya menyusut tajam dari 20 juta menjadi 6 juta; Augsburg pada mulanya dihuni oleh 80.000 jiwa, sekarang hanya oleh 20.000 jiwa. Jerman kekurangan segala-galanya. Ini semua diderita Jerman atas nama agama! Di tengah situasi yang serba buruk tersebut, manakah yang paling baik? Orang sederhana kiranya akan mengatakan dengan penuh keyakinan prinsip *minus malum* (yang kurang buruk di antara yang buruk): “Lebih baik kita mengusahakan hidup bersama dengan damai, daripada kita membela mati-matian agama kita dengan membunuh para pemeluk agama lain. Padahal kita tidak pernah diselamatkan oleh agama kita. Bukankah yang menyelamatkan kita hanyalah Dia yang menciptakan, memelihara dan mencintai serta menghendaki kehidupan?”

3. MEMISAHKAN KESATUAN AGAMA DAN POLITIK

Jika kesepakatan di bidang doktriner (menyangkut ajaran konfesional) tidak dapat tercapai, tidak mungkinkah ditemukan suatu dasar pemahaman, misalnya berhubungan dengan politik demi kepentingan Negara dan hidup bermasyarakat? Usulan semacam itu dimajukan pertama kali oleh Thomas More († 1535) dalam satir sosial berjudul *Utopia*, tahun 1516.⁸ Di sini pengarang dengan nada ironis dan bercengkerama memerikan suatu cerita tentang seorang teman dari Amerigo Vespucci yang membuatkan baginya sebuah negara yang mengagumkan, *Utopia*. Pendiri Negara yang bernama Utopo telah memaklumkan kebebasan beribadat dan propaganda, sambil membuktikan bahwa perjuangan keagamaan yang ada di Negeri itu hingga kedatangannya telah mempermudah penaklukan Negeri.⁹ Sebenarnya Thomas More tidak bermaksud menyuguhkan sebuah satire, melainkan suatu cita-cita, yang nantinya disangkal dalam karya-karya, seperti misalnya *Debèllacion of Salem*

7 Lihat C.V. Wedgwood, *The Thirty Years War*.

8 Lihat Thomas More, *Utopia*, Translated with an Introduction by Paul Turner, London: Penguin Books, 1968.

9 Lihat “Prolegomena”, in G.M. Logan, *The Meaning of More’s “Utopia”*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1983, pp. 3-18.

and Bysance, 1533; *Apologie*, 1533. Teori itu diafirmasikan di Perancis (pada belahan kedua abad XVI).

Di negeri Perancis ada suatu kelompok yang dekat dengan Catharina de Medici, yang telah menyampaikan kritik (kesiangan) terhadap prinsip tradisional *Une foi, une loi, un roi* (artinya, satu iman, satu undang-undang, satu raja). Kelompok ini menunjuk pada distingsi antara tatanan politik-temporal dengan tatanan spiritual-religius. Distingsi itu juga diperjelas dengan menggarisbawahi perbedaan mencolok antara Negara dan Gereja seraya memperjelas diversitas hakiki antara kesatuan politik dengan kesatuan religius. Kedua entitas ini mempunyai dasar yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara agama tradisional dengan dinasti dan nasion ditolak. Setelah *colloquium* di Poissy (1571) mengalami kegagalan, maka semakin jelaslah bahwa setiap bentuk rekonsiliasi bidang dogmatik tidak mungkin terjadi. Hal inilah yang antara lain diungkapkan oleh Jean Bodin (... 1596) dalam karyanya yang berjudul *Colloquium heptaplomeres* (Pembicaraan Bersama Tujuh Orang)¹⁰ dan *De la République*. Dengan demikian, dimulailah segala bentuk pengakuan hukum sipil dan politik orang-orang non-Katolik. Sebab “kedaulatan” bagi Bodin dimaksudkan kekuasaan absolut dan abadi yang dimiliki setiap bentuk Negara. Kedaulatan ini menjadi eksplisit terutama dalam penetapan undang-undang pada para “bawahan”nya tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Absolutisme Bodin ini tentu mengandung keterbatasan objektif dalam norma-norma etis, seperti keadilan, dalam hukum kodrat dan hukum ilahi. Meski demikian semua keterbatasan ini sekaligus merupakan kekuatannya. Kedaulatan yang tidak menghormati undang-undang ini bukan lagi kedaulatan, melainkan tirani. Pengakuan ini kemudian diterapkan di sejumlah Negara, misalnya di Perancis,¹¹ Polandia, Savoia, Bohemia.

Dalam tataran filosofis masalah toleransi juga digarap oleh Benediktus Spinoza dalam karyanya *Tractatus theologico-politicus*¹², dan terutama oleh John Locke dalam bukunya *Epistula de tolerantia*, 1685.¹³ Karya terakhir ini berkaitan dengan

10 Buku ini bertemakan toleransi religius dan menggambarkan pertemuan yang terjadi di Venezia antara 7 (tujuh) orang dari agama yang berbeda, yakni Katolik, Lutheran, Calvinis, Yahudi, Islam, Tak Beragama dan seorang pemeluk agama alami. Tesis utama buku Bodin ini, bahwasanya ada dasar alami yang secara umum terdapat pada semua agama. Atas dasar yang umum ini kiranya mungkin terjadi suatu kesepakatan umum, tanpa mengorbankan perbedaan-perbedaan (atau juga unsur plus-nya) dari semua agama. Oleh karena itu, Bodin sampai pada kesimpulan bahwa dasar alami implisit dalam agama-agama yang berbeda, itulah yang menyatukan secara lebih kokoh daripada yang memecah belah. Cfr. G. Reale – D. Antiseri, *Il pensiero occidentale*, II: 99.

11 Vide J. Garriçon, *L'Édit de Nantes et sa révocation*.

12 Karya ini, yang diterbitkan dalam tahun 1670 sebagai karya anonim dan dengan indikasi tempat cetak yang palsu, memancing polemik. Bagi Spinoza, para pemeluk agama-agama hidup kurang lebih dengan cara yang sama. Untuk mengetahui iman mereka (Kristen atau Islam atau Yahudi) cukuplah mengamati sikap dan pakaian mereka, cukuplah mengetahui apakah ia hadir di rumah ibadat ini atau itu; cukuplah melihat ia mendukung pandangan ini atau berjanji dengan kata-kata pemimpin itu. Selebihnya semua orang beragama itu sama saja. Lihat *Trattato teologico-politico*, a cura di R. Cantoni – F. Fagnani, Torino: UTET, 1972. Dikutip oleh G. Reale – D. Antiseri, *Il pensiero occidentale*, II: 324.

13 Berseberangan dengan Hobbes, bagi Locke Negara tidak harus memasukkan diri dalam masalah-masalah

penghapusan Edikt Nantes.¹⁴ Sebenarnya, Negara tidak mempunyai sarana untuk mengenali manakah kriteria kebenaran agama yang padanya banyak anggota masyarakat mempercayainya. Semua agama yang tidak mempraktikkan ritus-ritus amoral harus ditolerir dengan dua kekecualian, yakni ateis¹⁵ dan mereka yang tergantung pada prinsip asing. John Locke, yang dikenal juga sebagai “penginjil doktrin Whig”¹⁶ dengan demikian mendukung bahwa Negara secara mutlak harus tidak mencemaskan diri dengan keselamatan jiwa-jiwa. Hal ini sama saja dengan memperlebar (secara logis) hak masyarakat umum yang kemudian ditelorkan dalam teori hak-hak kodrati. Tetapi karya Roger Williams, seorang pastor yang beremigrasi ke Amerika Utara, yang berjudul *The Bloody Tenet of Persecution for Cause of Conscience*, London 1644, acapkali dinilai sebagai sebuah karya yang sangat skandalistis.

It is the will of command of God, that since the coming of his Son, the Lord Jesus, a permission of the most Paganish, Jewish, Turkish or Antichristian consciences and worships, be granted to *all* men in all Nations and Countries: and they are onely to be fought gainst with that Sword which is only (in Soule matters) able to conquer, to wit, the Sword of God’s Spirit, the Word of God.¹⁷

Nampak jelas, bahwa R. Williams mendukung tesis pemisahan radikal antara Negara dan Gereja sebagai satu-satunya obat mujarab bagi penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh agama.

4. UNSUR-UNSUR FUNDAMENTAL TOLERANSI

Sejak tahun 1685 raja Perancis, Louis XIV, berusaha dengan pelbagai cara untuk memPERTOBATKAN orang-orang Perancis yang telah menjadi pengikut Calvin

keagamaan. Dan karena iman bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, maka iman perlu dihormati dan toleransi menjadi mutlak perlu. Toleransi terhadap mereka yang berbeda agama itu sejalan dengan Injil dan akal budi. Sikap itu bagaikan membawa orang-orang buta pada terang benderang. G. Reale – D. Antiseri, *Il pensiero occidentale* ..., II: 391.

- 14 John Locke dalam karyanya itu mengumpulkan sejumlah alasan klasik untuk mendukung gagasan tentang toleransi seperti misalnya hormat akan suara hati. Ditegaskannya, “... *Si quis heterodoxos ita convertat ad fidem, ut cogat ea profiteri quae non credunt ... illum ... velle Ecclesiam christianam, quis est qui potest credere?*” Dikutip dari G. Martina, *La chiesa* ... II: 119. Selain alasan itu, ia juga menyebutkan bahwa toleransi itu merupakan kebiasaan khas kristianisme, tetapi yang paling mendasar adalah inkompetensi Negara dalam masalah-masalah keagamaan, mempertahankan kebebasan, integritas tubuh, hak milik termasuk di dalamnya keselamatan jiwa. Lihat pula “introduction” setebal 42 hlm., dalam *Epistola de Tolerantia. A letter on Toleration*. English Translation with an Introduction and Notes by J.W. Gough, Oxford: Oxford University Press, 1968.
- 15 Sebab para ateis mengacaukan dasar-dasar utama kehidupan sosial.
- 16 Lihat B. Williams, *The Whig Supremacy*..., p. 3.
- 17 Tekanan berasal dari pengarang buku, *The Bloody Tenet, of Persecution, for Cause of Conscience, Discussed, in A Conference Between Truth and Peace*, London 1644, dikutip langsung dari N. Carlin, “Toleration for Catholics in the Puritan revolution”, in O.P. Grell – B. Scribner, (ed.), *Tolerance and Intolerance* ..., p. 219.

agar memeluk kepercayaan Katolik. Untuk mencapai tujuan ini ia memutuskan mengirim pasukan kerajaan ke wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas Calvinis. Kasus yang paling mencolok terjadi atas diri Pierre de Garisson, 6 September 1685. Ia adalah seorang Calvinis yang menyatakan secara resmi menyeberang ke agama Katolik demi membebaskan diri sendiri dan keluarganya dari ancaman, kecelakaan dan kehancuran. Dalam sebuah pernyataan rahasia, yang diredaksikan dengan sangat teliti dan dengan cara pengungkapan yang sangat jelas, ia menegaskan perihal kebenaran imannya yang Calvinis.

Seorang raja Polandia yang beragama Katolik, Stefanus Báthori pada akhir abad XVI, menegaskan, “Sayalah raja dari rakyat saya, bukan dari suara hati.” Ketiga hal inilah dikhususkan bagi Allah: Dia menciptakan dari ketiadaan; Dia mengetahui masa depan; dan Dia memerintah atas sekalian suara hati. Di hadapan segala pernyataan dan kebijakan politik keagamaan itu kita dapat mengajukan pertanyaan berikut ini: Manakah sikap Gereja?

5. REALISASI IDE TOLERANSI

Sejarah perjalanan sikap toleran tidaklah serba sederhana dan mudah. Terkadang ada sejumlah pemikiran dan kebijakan yang relatif maju, tetapi pada waktu yang sama, di tempat lain terdapat praktik-praktik yang dilatarbelakangi oleh alam pikiran yang justru memperlihatkan langkah-langkah mundur. Berikut ini akan kita lihat beberapa tahap hakiki dari langkah-langkah mundur tersebut.

5.1. Konflik Bermotif Agama dan Politik

Pembunuhan massal pada pesta Santo Bartolomeus, 23-24 Agustus 1572: ribuan pengikut Calvin [Huguenots] dianiaya dan dibunuh di Paris dan di sejumlah kota di Perancis [termasuk di antaranya adalah pemimpin mereka, Gaspar de Coligny, 1519-1572] atas amanat Catherine de Medici.¹⁸ Mereka menjadi korban keganasan warga sipil yang mengaku penganut Katolik, bukan korban tindak kekerasan serdadu Perancis saat itu. Warga sipil Katolik tersebut mau mempertahankan kesatuan iman. Hidup manusia tidak berharga, iman dihayati secara fanatik dan picik, menentang setiap bentuk toleransi, tindak kekerasan merupakan cara yang lazim dari pihak pemerintah tirani.

Orang-orang Protestan Perancis ini pada mulanya menanamkan kekuatan pada barisan tentara/pasukan yang tangguh. Mereka juga mempunyai basis komunitas politik di empat kota Perancis yang sangat kuat, misalnya di La Rochelle [pantai

18 Baca M.P. Holt, *The French Wars of Religion ...*; J.H. Elliott, *Europe Divided ...*; R.S. Dunn, *The Age of Religious Wars*.

Samudera Atlantik], La Charité di Loire, Cognac di Charente dan Montauban di Tarn. Perang sipil ini kemudian memperjelas, bahwa pihak Protestan secara berangsur-angsur kalah. Itulah sebabnya gerakan Protestan di Negeri Perancis menjadi sangat lemah. Hal yang kiranya lebih menarik adalah kebijakan politik yang dianut oleh Takhta Suci. Paus Pius V, 28 Maret 1569, mendesak Catherine de Medici, penguasa Perancis, untuk menumpas habis musuh-musuh Gereja Katolik secara mematikan.

Di Belanda ada gejolak, karena Spanyol berusaha mempertahankan hegemoni di sana, sementara itu penduduk Belanda menentanginya.¹⁹ Paus Pius V, yang mengetahui situasi itu hanya melalui sumber tunggal, yakni Spanyol, beranggapan bahwa cara yang terbaik adalah mempertahankan aspek religius dan mengakhiri kemelut itu dengan kemenangan agama Katolik atas aspirasi nasional.²⁰ Dengan peristiwa tersebut secara tersamar terulang kembali kesalahan politis Paus Bonifatius VIII di hadapan suatu realitas yang baru sama sekali, yakni Negara nasional. Belanda sudah menyatakan sendiri sebagai Negara yang berdaulat dalam tahun 1609 dan secara definitif pada tahun 1648. Gereja mengesankan bersekutu dengan penguasa asing di negeri Belanda.

5.2. Edik Nantes, 1598²¹

Raja Henry IV, 13 April 1598, mempromulgasikan Edikt Nantes: minoritas pengikut Kalvin, yang disebut Huguenots, diizinkan untuk mempraktikkan tuntutan dan ajaran agama mereka kecuali di beberapa kota tertentu. Mereka juga memperoleh kesamaan hak dan kewajiban sipil serta politik. Paus Klemens VIII menilai langkah politik-keagamaan raja Perancis ini sebagai suatu kekalahan pihak Katolik dan kemenangan pihak Protestan.

Di Perancis orang-orang Protestan Perancis menikmati suasana umum yang lebih baik dan terjamin dibandingkan suasana orang-orang Katolik di Inggris. Lain halnya di Polandia yang dikenal sebagai “surga bagi para bidaah”. Polandia merupakan kasus unik: mayoritas penduduk beragama Katolik. Para pemimpin negeri ini mempunyai hubungan yang sangat baik dan hangat dengan Takhta Suci. Mereka melaksanakan restorasi Katolik, tetapi bersamaan dengan itu mengizinkan kebebasan beribadat. Dengan sengaja Polandia menolak setiap bentuk penggunaan kekerasan demi mendukung agama Katolik. Raja Sigismundus Augustus [1548-1572] memperkenalkan toleransi tersebut kepada para penerusnya, Stefanus Báthory dan Sigismundus III. Mereka ini kemudian menetapkan Pakta toleransi dalam ketetapan

19 Baca G. Parker, *The Dutch Revolt*

20 Baca sebuah studi yang sangat lengkap dan berbobot P. Geyl, *The Netherlands in the Seventeenth Century* Cfr. etiam, A. Pettegree, “The Politics of toleration in the Free Netherlands, 1572-1620”, in O.P. Grell – B. Scribner, (eds.), *Tolerance and Intolerance* ..., pp. 182-198.

21 Lih. J. Garriçon, *L'Édit de Nantes*.

yuridis. Austria dengan *Litterae Majestatis*, 9 Juli 1609, memberlakukan kebebasan beragama di Bohemia, Moravia dan Selesia.

5.3. Perdamaian Westfalen [1648]²²

Perdamaian ini disepakati di Münster antara kaisar Jerman dan pihak Perancis; dan di Osnabrück antara kaisar Jerman dan pihak Swedia yang Protestan. Dalam traktat Münster disepakati: persamaan hak antara orang Katolik, Lutheran [pengikut *Pengakuan Iman Augusta*] dan reformati/Kalvinis. Kemudian, pangeran tidak dapat lagi memaksakan agamanya kepada rakyat/bawahannya.

Selain itu, diizinkan pula kultus domestik bagi para non-konformis. Perdamaian ini, tentu saja, menempatkan orang-orang Katolik setara secara sosial dan yuridis dengan para Lutheran dan Calvinis. Karena itulah Paus Innocentius X memprotesnya dengan bulla *Zelus domus Dei*. Maksudnya tidak lain adalah supaya hak Gereja Katolik Roma tidak dikurangi oleh mereka yang mencari keuntungan di luar kemuliaan Allah. Bulla tersebut terasa sangat keras dan tidak irit dalam kecaman. Tak satu negara Katolik pun yang bersusah-payah menghiraukan protes ini. Sri Paus dipaksa menerima secara bertahap situasi aktual di lapangan.

5.4. Langkah-langkah Mundur

Di bawah kepemimpinan wangsa Tudor,²³ Stuart dan Cromwell, Inggris menempuh politik intoleransi. Negeri ini boleh dipandang paling intoleran dalam hal agama. Henry VIII terus-menerus melakukan teror dan penganiayaan terhadap orang Katolik dan Lutheran. Ketika Inggris di bawah Elizabeth, orang Katolik dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan negara. 1672, Charles II mengizinkan orang Katolik untuk mempraktikkan kebebasan beragama. Tetapi izin ini hanya berlangsung selama setahun.

Karena parlemen berhasil melumpuhkan kebijakan raja. Menurut konstitusi Inggris: raja tidak dapat memungut pajak [lagi] tanpa persetujuan parlemen. Parlemen memanfaatkan situasi ini, mengingat negara sedang membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan logistik pasukan Inggris yang berperang melawan Belanda. Mau tidak mau harus dirancang sebuah perundingan antara raja dan parlemen. Raja kemudian menarik kembali izin yang sudah diberikan kepada orang Katolik. Selain itu, semua pegawai negeri bersumpah demi menégasi transubstansiasi. Mereka ini juga diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kultus ekaristi seturut ritus Gereja Inggris. Inilah yang disebut *The Test Act*, 1673.

22 Baca C.V. Wedgwood, *The Thirty Years War ...*, pp. 463-526.

23 Vide Ch. Morris, *The Tudors*.

Dalam periode yang sama Louis XIV²⁴ di Perancis menarik kembali Edikt Nantes [18 Oktober 1685].²⁵ Ketentuan baru ini berakibat penghancuran gedung-gedung ibadat Calvinis, penutupan semua sekolah Protestan, larangan terhadap setiap rapat yang dimaksudkan untuk beribadat, mewajibkan semua keluarga Calvinis untuk membaptiskan anak-anak mereka secara Katolik, melarang Calvinis untuk meninggalkan negeri Perancis.

Sangatlah jelas, bahwa agama Katolik Roma harus menjadi tuan di negeri Perancis, dan negara memfasilitasi berkuasa agama Katolik, hal mana terlihat dalam rumusan Edikt Nantes artikel 3 dan 18

Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera rimase et établie en tous lieux et en droits de notre royaume et pays de notre obéissance où l'exercice d'icelle a été intermise, pour y être paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empêchement; [...] et que tous ceux qui durant les troubles se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant aux ecclésiastiques, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu'ils avaient auparavant qu'ils en fussent dessaisis.

Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite religion, pour les faire baptiser ou confirmer en l'Église catholique, apostolique et romaine²⁶

Agar orang Calvinis bertobat ke dalam agama Katolik, mereka harus menempuh “wajib militer” dan kemudian ditugaskan di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Mengesankan, bahwa Louis XIV adalah pelaku setia rezim totaliter dengan kekuasaan mutlak. Anggapannya pun sangat naif: kesatuan agama merupakan dasar yang paling kokoh bagi kesatuan politis. Oleh karena itu, Edikt Nantes dipandang sebagai hambatan yang perlu disingkirkan. Raja Louis juga bermaksud untuk memperlihatkan kepada Paus Innocentius XI, bahwa dirinya adalah pembela setia dari Gereja Katolik. Kendati pada dasarnya Innocentius XI tidak begitu menaruh rasa hormat kepada “Raja Matahari” ini, tetapi ia akhirnya juga memuji langkah Louis XIV dan menjamin baginya berkat surgawi dengan perantaraan Gereja Kristus; dan Perancis layak disebut “Puteri Setia Gereja”.

Akibat negatif penarikan Edikt Nantes adalah 200.000 Calvinis [kendati segala bentuk larangan] meninggalkan Perancis. Mereka ini pergi dengan membawa serta seluruh keahlian mereka terutama di bidang perekonomian. Mereka yang tinggal di Perancis seringkali dianiaya. Tegasnya, pencabutan Edikt Nantes memperlemah kesatuan Negara; dan Gereja Katolik di Perancis menggoreskan sejarah kelam.

24 Baca V. Cronin, *Louis XIV*.

25 Lihat E. Labrousse, *La révocation de l'Edit de Nantes*.

26 “Kami menetapkan bahwa Katolik, agama Roma dan Apostolik, akan direstorasi dan ditetapkan kembali di semua tempat dan wilayah kerajaan dan negara kami demi kekuasaan kami, di mana ...*Corps Diplomatique*, ed. by J. Dumont, Amsterdam, 1726, V, 245-250 dikutip oleh J. Garrisson, *L'Édit de Nantes* ..., pp. 21-22.

5.5. Revolusi Inggris dan Toleransi

Tahun 1687 James II, saudara dan pengganti Charles II, menarik kembali *The Test Act* dan mengizinkan kebebasan beragama bagi orang Non-Anglikan. Segera sesudah James III [d'Orange] naik takhta ditetapkanlah sekali lagi inferioritas yuridis orang-orang Katolik, melarang mereka ini untuk melakukan ibadah keagamaan. Orang Katolik juga dilarang menerima warisan.

5.6. Revolusi Kemerdekaan Amerika Serikat

Deklarasi Kemerdekaan, 4 Juli 1776, yang diredaksikan oleh Thomas Jefferson, mengungkapkan kesadaran yang sudah lama diperjuangkan oleh John Locke dan J.-J. Rousseau. Dalam preambule Deklarasi ditegaskan kesamaan hak semua orang, termasuk di antaranya yang utama adalah kehidupan, kebebasan, usaha mencapai kegembiraan. Kebebasan beragama tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan yang diberikan oleh lingkungan masyarakat atau negara, melainkan suatu hak yang melekat pada diri setiap orang.²⁷ Kendati di beberapa negara bagian seperti New Jersey, New York, New Hampshire Konstitusi menegaskan bahwa Konstitusi mempertahankan sikap intoleran; akan tetapi Konstitusi Federal, 1787, artikel 6 menyatakan bahwa negara tidak mengenal setiap bentuk diskriminasi berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.

Revolusi Amerika Serikat melahirkan kemerdekaan warga negara di hadapan keyakinan agama. Di sini Negara tidak mengatur para warganya harus beragama atau tidak beragama. Keyakinan agama adalah urusan pribadi atau perorangan; Negara tidak berwenang dalam masalah-masalah doktriner dan keagamaan; kebebasan merupakan dasar yang mutlak perlu bagi agama. Inilah warisan abadi Revolusi Amerika Serikat.

5.7. Kartu Identitas Toleransi dari Yosef II [1781]

Pengaruh *Enlightenment* sangat jelas dalam undang-undang yang ditetapkan oleh Kaisar Joseph II, tidak lama setelah ia naik takhta. Kaisar Joseph II memang pernah mempromulgasikan *The Act of Toleration (Toleranzpatent)*, dan para sejarawan memandangnya sebagai momentum berakhirnya kurun waktu absolutisme konfesional.²⁸ *Toleranzpatent* ini dimaksudkan untuk mendiskriminasi terhadap para penganut agama Protestan (namun kurang memperhatikan sikap diskriminatif terhadap

27 Bdk. Deklarasi hak-hak manusia yang ditetapkan di Virginia, 12 Juni 1776. Cfr. etiam Konstitusi Pennsylvania, 28 September 1776.

28 Lihat Jaroslav Pánek, "The question of tolerance in Bohemia and Moravia in the age of the Reformation," in O.P. Grell – B. Scribner, (eds.), *Tolerance and Intolerance ...*, p. 242. Toleransi apapun berhadapan dengan non-Katolik tidak dapat terpikirkan: dinyatakan seteru Gereja Katolik dan Negara, mereka itu menempatkan diri mereka sendiri sebagai yang teraniaya baik sebagai heretik maupun kriminal politik.

para pemeluk agama Katolik Ortodoks, Yunani). Promulgasi ini mempunyai sasaran yang berbeda. Bagi Kaisar ukuran-ukuran yang diambil terhadap diskriminasi pertama-tama langkah maju ekualitas menyeluruh. Demi alasan itu, maka dia menginginkan agar kelompok minoritas dilindungi: apakah dia menghormati mereka, sebagaimana dia lakukan terhadap orang Protestan ataukah meremehkan mereka sebagaimana ia melakukannya terhadap orang-orang Yahudi.²⁹

Meskipun begitu, Kaisar Joseph II ingin mengangkat standar mereka dengan mengikuti *Maklumat Toleransi*. Sebab baginya, kesamaan di depan hukum yang dinyatakan dan dipaksakan oleh pemerintah yang absolut bukanlah soal sentimen (perasaan), melainkan tentang rasionalisme utilitarian.³⁰ Agar bertahan pada katolisisme sebagai agama yang dominan, maka di depan hukum baik orang Katolik maupun non-Katolik diperlakukan sama. Tetapi perlakuan ini dijamin kalau orang memiliki kartu identitas. Selain itu, ditetapkan pula kebebasan dalam pelaksanaan kultus pribadi, pembatasan terhadap aktivitas pendidikan bagi kaum Lutheran, Calvinis dan Ortodoks. Berlakunya kartu identitas ini baru ditarik kembali pada akhir hidupnya.

6. SIKAP RESMI GEREJA

Mungkin baik dalam konteks ini, jika dipilah terlebih dahulu arti Gereja. Masing-masing unsur berikut ini bersikap tidak sama satu dengan lainnya: awam, teolog (klerus yang mempunyai latar belakang pendidikan “akademik”), hierarki setempat, dan Kuria Roma. Pada umumnya awam Katolik bersikap mendukung pelaksanaan toleransi, dan menentang pemaduan antara kesatuan religius dan politik.

Sementara para teolog dan hierarki setempat pada umumnya mengharapkan diterapkannya kebebasan beragama. Sedangkan Kuria Roma tampak belum akrab dengan gagasan (apalagi praksis) tentang toleransi. Roma mendorong raja Perancis untuk memulai perang terbuka terhadap Huguenots; Edikt Nantes dipandanginya sebagai kegagalan katolisisme, perdamaian Westfalia [1648] dikecam dengan pedas, dan Revokasi Edikt Nantes disambut dengan sukacita. Dalam konteks ini, Kuria Roma hanya melihat satu aspek dari toleransi, yakni perkosaan terhadap hukum-hukum kebenaran. Dengan demikian, kebenaran disejajarkan dengan kesalahan, dan kemenangan indiferentisme. Singkatnya, Kuria Roma tidak pernah melihat aspek positif dari toleransi.

Kita perlu melihat kompleksitas masalah dalam kaitannya dengan bahaya kebebasan beragama; tanggungjawab berat Takhta Suci atas kesatuan agama dan faktor mentalitas zaman itu. Selain itu, perlu pula dipahami bahwa pembelaan terhadap sebuah kebenaran absolut, suatu kekayaan rohani yang diwahyukan merupakan kecemasan utama yang menyita perhatian Roma. Kuria Roma tetap setia pada prinsip

29 Lihat studi representatif dalam bidang ini Elisabeth Kovács (hrsg.), *Katholische Aufklärung und Josephinismus*.

30 Bdk. Robert A. Kam, *A History of the Habsburg Empire ...*, p. 186.

tidak memaksa seorang pun yang tidak dibaptis untuk memeluk iman Katolik. Dalam konteks peristiwa historis abad ke-17 dan ke-18 orang belum sanggup mempelajari dengan tepat masalah toleransi dan intoleransi. Robertus Bellarminus yang hidup pada akhir abad XVI sangat setia pada pemikiran tomistis dan mendukung hukuman mati bagi para bidaah.

Molinos [1687], misalnya, karena ajarannya dinilai sesat, maka dia divonis hukuman seumur hidup. Seorang rubiah diproses hukum lantaran melakukan simulasi berkenaan dengan fenomena adikodrati [mungkin ia memperoleh visiun dan menjadi “orang pintar”]. Di Napoli beberapa ahli matematika diseret ke meja hijau karena dituduh ateis [1697] dan terpaksa dijatuhi tahanan rumah. Proses inkuisisi yang terakhir terjadi di Spanyol, 26 Juli 1826 terhadap seorang guru, Gaetanus Ripoll, seorang deistis yang tidak pernah mau bertobat. Peristiwa ini terjadi 14 abad setelah hukuman mati terhadap heretik, Priscillianus, yang juga terjadi di Spanyol.³¹

Data berikut ini cukup signifikan untuk melihat bagaimana praksis orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen Protestan yang semula menuntut toleransi, tetapi de facto tidak toleran terhadap anggota kelompok Kristen Protestan sendiri yang dinilai melawan dan berseberangan dengan ketentuan umum. Mereka ini juga disebut “bidaah” dan dieksekusi dalam Eropa Reformasi (perkiraan tahunan).³²

Wilayah	1520-1529	1530-1554	1555-1565	1566-1599
Jerman	38	13	2	0.7
Swis	4	2	1	0.1
Belanda*	1.2	20	40	(2.7)
Perancis**	1	12	(20)	0.5
Inggris + Skotlandia	2	1.6	30	0.1
Spanyol (Inkuisisi)	0	0.5	12	2.0
Italia (Sicilia)	0	0.6	3	2.2

* Tidak termasuk tahun 1567-1574 yang dipandang sebagai “Konsili Berdarah” karena mengeksekusi sejumlah orang yang terlibat dalam ikonoklasme, pemberontakan, penghasutan dan ajaran sesat.

** Tidak termasuk tahun 1560-1564, yang melenyapkan 200 orang karena melakukan pemberontakan atau penghasutan; selama berlangsung Perang Agama yang pertama, 3 anggota parlemen dijatuhi hukum seumur hidup.

-
- 31 Dan setelah dipelajari secara cermat ajaran Priscillianus itu ternyata ortodoks. Lihat C.V. Manzanares, *Dizionario sintetico di patristica*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995, hlm. 152-153. Vide etiam, Eddy Kristiyanto, *Sahabat-sahabat Tuhan. Asal usul dan Perkembangan Awal Tarekat Hidup Bakti*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, Catatan no. 7, hlm. 143.
- 32 Diambil dari William Monter, “Heresy executions in Reformation Europe, 1520-1565,” in O.P. Grell – B. Scribner, (eds.), *Tolerance and Intolerance ...*, p. 49.

7. PENUTUP

Dengan pecahnya Perang 30 tahun dan Perdamaian Westfalia, 1648, Eropa semakin menyadari bahwa kini sudah tidak mungkin lagi menciptakan sebuah Eropa dengan satu agama yang sama. Seturut tata geografis, seakan semua wilayah ditentukan dengan sangat baik: Eropa Utara dihuni oleh Reformis; Tengah oleh Protestan; Selatan oleh Katolik. Tetapi yang lebih menarik daripada sekedar faktor geografis tersebut ialah diversitas keyakinan agama tersebut menyuburkan kesadaran akan kebenaran pada semua orang saleh. Penghayatan dan ungkapan keagamaan menjadi lebih jemih. Perpindahan dari pemahaman akan agama yang alami dan rasional dapat mudah dimengerti. Toleransi agama menuntut suatu dialog yang mendasar, hormat pada kesadaran pribadi dan tidak dipaksakan. Kesadaran ini berdasarkan iman-kepercayaan, yang menentang semua bentuk kemunafikan. Semua pelaku dialog yang penuh hormat itu berkeyakinan, bahwa mereka adalah putera dan puteri dari ibu yang sama, yakni agama alami, yang adalah paling kuno, tetapi juga bawaan setiap orang dan merupakan dasar setiap agama, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Hugo Grotius dan Herbert de Cherbury.

Jelas, bahwa Reformasi keagamaan yang dirintis oleh Martin Luther bukanlah satu-satunya alasan toleransi religius. Reformasi Protestan sendiri, dalam kenyataannya, tidak toleran terhadap gerakan-gerakan dan pribadi-pribadi tertentu yang melancarkan reformasi dalam Reformasi. Dengan kata lain, reformasi itu hadir sebagai perpecahan dalam gerakan gagasan-gagasan. Tetapi terhadap kenyataan itu segera perlu dicatat, bahwa tidak mungkin lagi menciptakan suatu budaya yang bercorak uniform -di bawah kesatuan kultur gerejawi seperti dalam Abad Pertengahan- kekuatan-kekuatan baru, negara-negara sedang membentuk diri dengan berangkat dari kekhasan mereka sendiri dan berdasar pada cita-cita serta kebebasan sebagai suatu bangsa.

Selain itu, toleransi secara hakiki merupakan salah satu akibat positif dan wajar dari Protestantisme yang dirintis oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Sebab Reformasi itu setelah sekian waktu lamanya akhirnya membuka mata dan hati para pengambil keputusan politik-keagamaan; dan eksistensi toleransi merupakan keniscayaan.³³ Dengan kata-kata lain, toleransi merupakan konsekuensi langsung, logis dan tak terelakkan dari praktik religius sekaligus keterbukaan pada perubahan zaman dan tuntutanannya. Akan tetapi kemudian para ahli ilmu sejarah dan politik keagamaan menangkap seluruh proses toleransi dan intoleransi dalam sembilan manifestasi yang muncul selama abad XVI: ada kebebasan dalam berkepercayaan, tetapi hanya secara privat (tidak publik); ada kebebasan beragama secara pasif; kesetaraan religius sesekali diterima sebagai suatu kompromi yang dipaksakan (*licenced co-existence*); toleransi hanya diperuntukkan bagi para penguasa (mengingat prinsip *cuius regio, eius religio*); toleransi dapat diterima sebagai sebuah strategi sementara,

33 Untuk pendalaman topik ini dapat dimanfaatkan John D'Arcy May, *Pluralism and the Religions. The Theological and Political Dimensions*, London: Cassell, 1998.

karena eksistensi kelompok-kelompok yang menentanginya tidak diizinkan; di sana-sini muncul toleransi dalam forma latitudinarianisme pastoral; toleransi muncul karena sejumlah sumber yang memperlihatkan terjadinya kesepakatan yang lebih luas; muncul toleransi pada dasar-dasar ekonomis dan tentang rasionalitas praktis.³⁴

Sering kali terjadi, bahwasanya pertimbangan-pertimbangan politik ikut mempengaruhi, bahkan menentukan kebijakan toleransi dan intoleransi antarpenganut agama. Agak disayangkan, bahwa ajaran resmi tentang toleransi dalam Gereja Katolik Roma baru muncul ke permukaan pada abad XX. Dengan demikian, kepingan-kepingan ide tentang toleransi masih membutuhkan beberapa abad – dan ini berarti hanya setelah korban semakin banyak berjatuhan – untuk sampai akhirnya ditelorkan dalam Konsili Vatikan II (1962-1965) dengan dekret *Nostra Aetate*. Dan ini pun tidak berjalan mulus, karena masih ada pemimpin-pemimpin agama Kristen yang mengklaim sejumlah kebenaran Kristen yang absolut dengan mengeksklusikan kebenaran-kebenaran agama-agama lain. Dan ada satu fenomena menarik yang patut dicatat pada akhir karya ini: Sebelum ketetapan konsili tersebut Gereja selalu meminta kepada negara-negara untuk melindungi kebebasan beragama (Gereja), jika orang-orang Katolik di situ merupakan minoritas; tetapi Gereja tidak menyuarakan toleransi terhadap kepercayaan lain ketika orang-orang Katolik itu mayoritas.

BIBLIOGRAFI

- Augustijn, C. *Erasmus da Rotterdam. La vita e l'opera*. Brescia: Morcelliana, 1989 (terj.).
- Cronin, V. *Louis XIV*. London: Collins Harvill, 1990.
- D'Arcy May, J. *Pluralism and the Religions. The Theological and Political Dimensions*. London: Cassell, 1998
- Dunn, R.S. *The Age of Religious Wars, 1559-1715*. New York-London: W.W. Norton & Company, 1979.
- Eddy Kristiyanto, *Sahabat-sahabat Tuhan. Asal usul dan Perkembangan Awal Tarekat Hidup Bakti*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Elliott, J.H. *Europe Divided 1559-1598*. London: Fontana Press,¹⁵ 1990.
- Garrisson, J. L'Édit de Nantes et sa révocation. *Histoire d'une intolérance*. Paris: Éditions du Seuil, 1985.
- Geyl, P. *The Netherlands in the Seventeenth Century 1609-1648*. London: Cassel, 1989.
- Grell, O.P. - B. Scribner, eds. *Tolerance and Intolerance in the European Reformation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

34 B. Scribner, "Preconditions of tolerance and intolerance in sixteenth-century Germany", in O.P. Grell – B. Scribner, (eds.), *Tolerance and Intolerance ...*, pp. 35-38.

- Hepburn, A.C. ed. *Minorities in History*. London: Edward Arnold Ltd., 1978.
- Holt, M.P. *The French Wars of Religion, 1562-1629*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Kam, Robert A. *A History of the Habsburg Empire 1526-1918*. Berkeley – Los Angeles – London: University of California, 1980.
- Kovács, E. Hrsg. *Katholische Aufklärung und Josephinismus*. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1979.
- Labrousse, E. *La révocation de l'Edit de Nantes. Une foi, une loi, un roi?* Saint-Amand: Éditions Payot, 1990.
- Locke, J. *Epistola de Tolerantia. A Letter on Toleration*. English Translation with an Introduction and Notes by J.W. Gough, Oxford: Oxford University Press, 1968.
- Logan, G.M. *The Meaning of More's "Utopia"*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1983.
- Lortz, J. *Die Reformation in Deutschland*. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1982.
- Martina, G. *La chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo*. II, Brescia: Morcelliana, ⁶1986.
- Morris, C. *The Tudors*. Glasgow: Fontana – Collins, ²²1990.
- Parker, G. *The Dutch Revolt*. London etc.: Penguin Books, ⁷1990.
- Reale, G. – D. Antiseri. *Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Corso di filosofia per i licei classici e scientifici*. Vol. 2 (*Dall'Umanesimo a Kant*). Brescia: Editrice la Scuola, ¹¹1990.
- Roeder, O.G. *The Smiling General. President Soeharto of Indonesia*. Djakarta: Gunung Agung Ltd., 1969.
- Wedgwood, C.V. *The Thirty Years War*. London-New York: Routledge, ⁴1989.
- Williams, B. *The Whig Supremacy. Oxford History of England*. Vol. X. Oxford: Oxford University Press, 1952.